AHKAM
Jurnal Hukum Islam dan Humaniora

p-ISSN : 2964-6332
e-ISSN : 2964-6340

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Crossref Garuda, Google, Base, etc.

https://doi.org/10.58578/ahkam.v3i1.2474

EKONOMI POLITIK DAN LINGKUNGAN HIDUP

Political Economy and the Environment

Bella Kharisma Putri & Lince Magriasti
Universitas Negeri Padang
Bellakharisma49@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Dec 25, 2023	Dec 30, 2023	Jan 4, 2024	Jan 7, 2024

Abstract

The aim of writing this article is to look at Political Economy and the Environment. The environment is everything that exists around humans and is in a reciprocal relationship. The living environment is a system that is a spatial unity between living things and other abiotic components. The interaction between the natural environment and its surroundings forms an ecological system (ecosystem). The environment plays a role as a habitat for living creatures on earth. Environmental components consist of two types, namely: Biotic components, living creatures which include animals, plants and humans. Abiotic components are non-living objects, including water, soil, rocks, air and sunlight. The data collection technique for this research is a library research library study sourced from various reading literature and previous research articles on Political Economy and the Environment. . The expansion of oil palm plantations in forest areas also has an impact on changes in the ecological landscape and changes in land use, changes in land cover as well as several serious environmental problems such as depletion of soil nutrients and increased carbon emissions due to deforestation and emissions inherent in the processing of oil palm fruit.

Keywords *: Economy ; Politic ; Results ; Environment*

Abstrak: Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat Ekonomi Politik Dan Lingkungan Hidup. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu: Komponen biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan manusia. Komponen abiotik adalah

AHKAM is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari.. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan library research yang bersumber dari berbagai literatur bacaan dan artikel penelitian terdahulu mengenai Ekonomi Politik Dan Lingkungan Hidup. Ekspansi perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan juga berdampak pada perubahan lanskap ekologi dan perubahan tata guna lahan, perubahan tutupan lahan serta beberapa masalah lingkungan yang serius seperti penipisan unsur hara tanah serta meningkatnya emisi karbon akibat pemangkasan hutan dan emisi yang melekat pada pengolahan buah kelapa sawit.

Kata Kunci : Ekonomi ; Politik; Lingkungan Hidup

PENDAHULUAN

Fokus dari studi ekonomi politik adalah fenomena-fenomena ekonomi secara umum, yang bergulir serta dikaji menjadi lebih spesifik yakni menyoroti interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik. Namun, dalam perkembangan yang berikutnya, istilah ekonomi politik selalu mengacu pada adanya interaksi antara aspek ekonomi dan aspek politik.

Adanya kelemahan instrumental ini menyebabkan banyak kalangan ilmuwan dari kedua belah pihak – berusaha untuk mempertemukan titik temunya, sehingga para ilmuwan ini berusaha untuk mencoba mengkaji hal ini dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dalam ekonomi politik. Dalam upaya memaksimalkan studi mengenai ekonomi politik, juga tidak boleh terlepas dari sistem ekonomi di negara yang bersangkutan.

Terkait dengan hal tersebut, setidaknya dalam berbagai jenis yang ada, terdapat dua sistem ekonomi besar dunia yang dibagi menjadi dua kategori pokok, yakni sistem ekonomi yang berorentasi pasar (ekonomi liberal) dan sistem ekonomi terencana atau yang lebih dikenal sebagai sistem ekonomi terpusat (sosialis).Sehingga dalam studi ekonomi politik akan ditemui masalah atau pertanyaan yang sama peliknya mengenai bagaimana faktor-faktor politik itu memengaruhi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.

Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Interaksi antar lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk sistem ekologi (ekosistem). Lingkungan memegang peranan sebagai habitat bagi kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Komponen-komponen lingkungan hidup terdiri dari dua jenis, yaitu: Komponen biotik, makhluk hidup yang meliputi hewan, tumbuhan, dan

manusia. Komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup, antara lain air, tanah, batu, udara, dan cahaya matahari.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menerapkan sistem deskriptif analisis dalam menuangkan (Darmalaksana, 2020). Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah studi kepustakaan library research yang bersumber dari berbagai literatur bacaan dan artikel penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Politik

Ekonomi politik pada dasarnya diambil dari bahasa Yunani yaitu polis yaitu sebuah kota atau unit politik dan oikonomike yang maknanya menuju manajemen rumah tangga. istilah ekonomi politik pada dasarnya interaksi antara kedua bidang ekonomi dan politik, yang pada awalnya lebih fokus kepada ilmu untuk mengelola perekonomian dengan ilmu untuk mengelola pemerintahan. Dapat dikatakan bahwa Politik Ekonomi adalah campur tangannya pemerintah dalam proses ekonomi.

Menurut Caporaso Dan Levine Pada awalnya ekonomi politik dimaksudkan untuk memberi saran pada penguasa dalam mengelola masalah masalah ekonomi. Selanjutnya lebih diartikan sebagai analisis ekonomi terhadap masalah-masalah politik. Kajian ini juga mempelajari institusi politik sebagai entitas yang bersinggungan dengan pengambilan keputusan, berusaha mempengaruhi pengambilan keputusan dan pilihan. Ekonomi Politik adalah disiplin ilmu yang komprehensif, lahir dari berbagai upaya yang dilakukan untuk menemukan sinergi, mengisi kekosongan (cross fertilization), yang tidak akan dijumpai dalam satu disiplin saja baik ekonomi maupun politik .

Pembangunan politik di negara berkembang bertolak belakang dengan pembangunan ekonomi, misalnya ketika kita hendak meningkatkan pembangunan politik dimana sebagai wakil rakyat yang mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan masyarakat legislatif harus menyuarakan kebutuhan masyarakat. Akibatnya mereka sering mengkritik pemerintah dalam sebuah mosi tidak percaya karena yakin bahwa pihak eksekutif yang bertanggung jawab terhadap kesalahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah. Hubungan ekonomi

dengan politik adalah jika pembangunan politik semakin meningkat akan berbanding terbalik dengan pembangunan ekonomi yang semakin merosot. Jika pembangunan politiknya menurun maka pembangunan ekonominya meningkat

Tujuan politik ekonomi pada garis besarnya dapat dikatakan bahwa pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan-perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Beberapa tujuannya yaitu : mengatasi pengangguran, menyetarakan pendapatan secara adil, meningkatkan produktivitas dan hal lainnya. Alat-alat Politik Ekonomi Tujuan yang ingin dilaksanakan pemerintah mengharuskan tindakan-tindakan tertentu. Tindakan tersebut dapat kita namakan "alat-alat " daripada politik ekonomi. Contoh alat-alat tersebut misalnya peraturan-peraturan dan larangan-larangan dan subsidi-subsidi pajak. Disamping itu pemerintah dalm keadaan tertentu, dapat juga mempengaruhi proses ekonomi, disebabkan oleh karena sebagian produksi dipegang oleh pemerintah sendiri.

Ekonomi Politik Pemerataan Pendapatan Dalam konsep ini tujuan pembangunan mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada aspek-aspek kualitatif dari pembangunan, yaitu mencakup masalah kemiskinan, kesenjangan, dan human resource development. Ekonomi Politik Ketergantungan Teori ketergantungan yaitu yaitu teori yang dalam menjelaskan perilaku manusia dan gejala atau proses sosial yang terjadi terutama lebih menekankan pada faktor-faktor lingkungan sebagai penyebabnya. Pengaruh aspek politik yang menyebabkan ketergantungan dikemukakan oleh Andree Gunder Frank yaitu Ketergantungan Negara-negara satelit (Negara periferal) terhadap Negara metropolitan (Negara pusat) diyakini terjadi sebagai akibat globalisasi sistem kapitalisme.

Ekonomi Politik Kebutuhan Pokok Salah satu hal penting kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan pokok (basic needs) penduduk. Alokasi bagi kebutuhan pokok tentu saja tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi. Kebutuhan pokok yang paling dianggap inti adalah pangan. Di Indonesia, kebutuhan akan pangan terutama berpusat pada kebutuhan akan beras sehingga kebijakan pangan di Indonesia sering identik dengan kebijakan perberasan. Dengan demikian, kebijakan beras menjadikan beras sebagai komoditas politik.

Ekonomi Politik Otonomi Daerah Tahun 1999 bisa dicatat sebagai terjadinya perubahan besar dalam memandang daerah. Terjadi beberapa perubahan dari sistem sentralisasi ke desentralisasi dalam merencanakan dan mengelola dana pembangunan bagi daerah masing-

masing dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Krisis Ekonomi-Moneter 1997/1998 Penyebab terjadinya krisis moneter yang melanda Indonesia salah satunya dari segi eksternal adalah ulah spekulan George Soros yang memicu krisis yang melanda Asia, mulai dari Thailand sampai Korea Selatan dan Jepang. Dan juga lemahnya fundamental ekonomi makro di Indonesia, kelemahan tersebut jika dibiarkan berlarut akan menjadi sumber kerawanan ketahanan ekonomi nasional, karena krisis moneter 1997/1998 tidak semata-mata krisis moneter dalam arti sempit, kemorosotan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika, tetapi sudah mengarah pada distorsi pasar,kenaikan harga, sembako menghilang, pengangguran meningkat dan krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sepuluh Tahun Krisis Moneter, Krisis Ekonomi yang Berkelanjutan (11 juli 1997-11 juli 2007) Krisis moneter yang terjadi tanggal 11 juli 1997 dimulai ketika bank umum mengalami rush atau penarikan dana pihak ketiga secara besar-besaran, Bang Indonesia sebagai Bank Sentral, dengan BLBI-nya, tidak lagi mampu menghadapi rush rupiah yang kemudian diikuti dengan managed floating rate. Kondisi ini mengakibatkan bank terpaksa membuka band dan akhirnya depresiasi rupiah terhadap US$ meluncur tidak terkendali sampai mendekati Rp 15.000/1 US$, Juli 1998 Laporan Bank Dunia khusus Indonesia,April 1997 sebenarnya sudah memberikan peringatan bahwa Indonesia perlu memacu tabungan dalam negeri agar mampu membiayai investasi dalam negeri dan tidak terlalu tergantung pada kredit luar negeri.Indonesia juga harus memperkuat fundamental ekonomi makr, kualitas SDM dan pemebnahan aparat birokrasi yang bersih, clean government.

Indikator makro ekonomi 2006, dalam angka menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi 5,6 % terjadi peningkatan pengangguran 40,5 (2005) menjadi 43 juta. Pada tahun 2006 peningkatan kemiskinan semakin meningkat. Adapun kondisi neraca pembayaran Indonesia belum favorable karena kendala keunggulan daya saing komoditas ekspor yang terus dari peringkat 46/49 negara (2001) menjadi 47/49 negara (2002), 57/59 negara (2003), 58/60 negara (2004), 59/60 negara (2005) akhirnya peringkat 60 dari 61 negara pengekspor 2006. Tingkat utilisasi kapasitas industry pasca krisis moneter belum pulih, masih dibawah 70% pada tahun 2006, demikian pula pertumbuhan sektor industry rata-rata masih dibawah rata- rata pra-krisis moneter dengan rata-rata pertumbuhan industry 1990-1997 > 10% menjadi menurun rata-rata 5% (1999-2006) dengan catatan pada tahun 1998, pertumbuhannya - 13,1 %.

Lingkungan Hidup

Menurut Undang Undang No. 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan ruang lingkup lingkungan hidup Indonesia meliputi ruang, tempat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berwawasan Nusantara dalam melaksanakan kedaulatan, hak berdaulat, dan yurisdiksinya. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Merujuk pada definisi di atas, maka lingkungan hidup Indonesia tidak lain merupakan Wawasan Nusantara, yang menempati posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang memberikan kondisi alamiah dan kedudukan dengan peranan strategis yang tinggi nilainya, tempat bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam segala aspeknya. Secara hukum maka wawasan dalam menyelenggarakan penegakan hukum pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah Wawasan Nusantara (Erman, 2017).

a. Lingkungan Hidup Alami

Lingkungan hidup alami merupakan lingkungan bentukan alam yang terdiri atas berbagai sumber alam dan ekosistem dengan komponen-komponennya, baik fisik, biologis, maupun berbagai proses alamiah yang menentukan kemampuan dan fungsi ekosistem dalam mendukung kehidupan. Lingkungan hidup alami bersifat dinamis karena memiliki tingkat heterogenitas organisme yang sangat tinggi. Segala proses yang terjadi di dalam lingkungan alami terjadi dengan sendirinya dan dalam keadaan tetap seimbang. Contoh lingkungan hidup alami adalah hutan primer yang segala kehidupan dan isi di dalamnya belum terkena campur tangan manusia.

Lingkungan fisik, yaitu lingkungan yang terdiri dari gaya kosmik dan fisiogeografis seperti tanah, udara, laut, radiasi, gaya tarik, ombak, dan sebagainya. Lingkungan biologis, yaitu segala sesuatu yang besifat biotis berupa mikroorganisme, parasit, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Termasuk juga di sini, lingkungan prenatal dan proses-proses biologi seperti reproduksi, pertumbuhan dan sebagainya.

b. Lingkungan Hidup Binaan atau Buatan

Lingkungan hidup buatan mencakup lingkungan buatan manusia yang dibangun dengan bantuan atau masukan teknologi, baik teknologi sederhana maupun teknologi modern. Lingkungan hidup alami diubah sehingga dapat dimanfaatkan karena kebutuhan hidup manusia yang cenderung selalu bertambah. Lingkungan hidup binaan bersifat kurang beranekaragam karena keberadaanya selalu diselaraskan dengan kebutuhan manusia. Lingkungan hidup buatan ini pada akhirnya dapat merusak keseimbangan, keselarasan, dan kelestarian yang semuanya terdapat dalam lingkungan alam. Hukum yang terdapat di alam mulai terganggu yang menghilangkan hakikat pokok kehidupan yang saling tergantung dan terikat

c. Lingkungan Hidup Sosial

Lingkungan hidup sosial terbentuk karena adanya interaksi sosial dalam masyarakat. Di dalam lingkungan hidup sosial ini terjadi interaksi dan berbagai proses lainnya, baik antar individu, individu dengan masyarakat, individu dengan budaya, maupun antarkelompok masyarakat. Lingkungan hidup sosial ini dapat membentuk lingkungan hidup binaan tertentu yang bercirikan perlakuan manusia sebagai makhluk sosial.

Lingkungan sosial dapat terbagi ke dalam tiga bagian diantaranya adalah lingkungan fisiososial (kebudayaan materil seperti peralatan, senjata, mesin, gedung dan lain-lain), lingkungan biososial (manusia dan interaksinya terhadap sesamanya dan tumbuhan beserta hewan domestik dan semua bahan yang digunakan manusia yang berasal dari sumber organik), dan lingkungan psikososial (tabiat batin manusia).

Fenomena Ekonomi Politik Dan Lingkungan Hidup

Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di bagian selatan Provinsi Kaltim yang mempunyai luas 11.603,94 km2. Terdiri atas 10 kecamatan, 135 desa/kelurahan dengan ibukota di Tana Paser. Kabupaten Paser awalnya bernama Kabupaten Pasir dengan jumlah penduduk pada tahun 2013 mencapai 249.991. Sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang cukup besar memberikan kontribusi terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Paser. sebesar 78,42%. Sektor pertanian masih merupakan sektor dominan yang masih menyerap tenaga kerja sekitar 40,08% lapangan usaha menyerap tenaga kerja. Disusul sektor perdagangan (18,51%) pertambangan dan pengalian

(14,79%), dan jasa sekitar12,70% (BPS Kabupaten Paser, 2014). Praktek politik ekonomi di daerah yang semakin marak seringkali berujung dengan politik atas nama pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. praktek politik ekonomi telah menyebar ke daerah, menyusul euforia reformasi dan transisi serta implementasi dari desentralisasi dan otonomi daerah. Tekanan atas sumberdaya alam terus meningkat atas nama investasi dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Laporan dari Dewan Nasional Perubahan Iklim menyebutkan duapertiga pendapatan Kabupaten Paser berasal dari pertambangan batu bara, pertanian dan perkebunan kelapa sawit (Sabbina, 2014).

Hal ini didukung dengan program pengembangan sejuta hektar lahan sawit oleh Pemerintah Provinsi Kaltim dan dipermudahnya proses perijinan. Sementara untuk pertambangan batu bara mengalami perkembangan yang pesat juga seiring dengan kemudahan untuk mendapatkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) oleh pemerintah daerah (Andi Tenri Sompa, 2022). Struktur politik penguasa dalam pemerintahan eksekutif dan legislatif yang berhubungan dengan TKHL di Kabupaten Paser memberikan andil yang cukup besar dalam penguasaan sumber-sumber daya alam diantaranya berupa hasil hutan kayu, tambang emas dan tambang batubara sebagai basis ekonomi yang ada di masyarakat. Dari gambaran yang jelas bahwa struktur legislatif akan memberikan kontribusi dukungan yang besar bagi penguasaan pemerintah eksekutif terhadap basis-basis sumber daya alam (kayu dan batubara) yang terkait dengan TKHL sebagai basis ekonomi penunjangnya. Para elit lokal dapat mengkooptasi atau berkolusi dengan pemerintah demi kepentingan merebut sumberdaya (Mangopo, 2017)

Dibanyak daerah bupati menggunakan kekuasaan mereka untuk mendapatkan manfaat dri kebijakan yang dibuatnya (Syahrina, et.al., 2015; Hidayat, 2014; Tanasaldy, 2014; Timmer, 2014). Sehingga kelangsungan sumberdaya alam sangat tergantung dari kepemimpinan lokal dan kapasitas pemerintah daerah (Prayitno, et.al., 2013). Laporan dari FWI (2011) dan FWI (2014) menyebutkan angka laju deforestasi untuk Provinsi Kaltim mencapai 185.829,79 ha/tahun dengan angka deforestasi 1.858.297,62 ha dalam periode 2000-2009. Angka ini menunjukan bahwa tingkat deforestasi untuk Provinsi Kaltim telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Selanjutnya laporan angka laju deforestasi tersebut mengalami penurunan menjadi 112.124 ha/tahun dengan angka deforestasi 448.494 ha dalam periode 2009-2013.

Berdasarkan hasil desk study (studi literatur) dan kajian lapangan terkait dengan permasalahan TKHL di Kabupaten Paser, Kaltim, dapat disimpulkan 3 (tiga) masalah

strategis yang berkaitan dengan manajemen TKHL di Kabupaten Paser. Laporan hasil studi Angi (2013) menyebutkan ketiga masalah tersebut diantaranya: 1). Tumpang tindih perizinan kehutanan, pertambangan dan perkebunan; 2). Tidak adanya pengakuan dari pemerintah atas hak kelola hutan masyarakat adat; 3). Tidak adanya kepatuhan perusahaan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan dalam melakukan perbaikan masalah lingkungan hidup .

KESIMPULAN

3 (tiga) masalah strategis yang berkaitan dengan manajemen TKHL di Kabupaten Paser. Laporan hasil studi Angi (2013) menyebutkan ketiga masalah tersebut diantaranya: 1). Tumpang tindih perizinan kehutanan, pertambangan dan perkebunan; 2). Tidak adanya pengakuan dari pemerintah atas hak kelola hutan masyarakat adat; 3). Tidak adanya kepatuhan perusahaan bidang kehutanan, pertambangan dan perkebunan dalam melakukan perbaikan masalah lingkungan hidup .

DAFTAR PUSTAKA

Andi Tenri Sompa. (2022). *DEFORESTASI DI KABUPATEN BANJAR DALAM PERSPEKTIF POLITIK LINGKUNGAN*. *7*(2).

Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library U Bandung*.

Erman, E. (2017). Di Balik Keberlanjutan Sawit: Aktor, Aliansi Dalam Ekonomi Politik Sertifikasi Uni Eropa*. *Masyarakat Indonesia*, *43*(1), 1–13.

Mangopo, E. A. dan C. B. W. (2017). *Kajian Ekonomi Politik Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan di Kabupaten Paser, Kalimatan Timur*.

Sabbina, A. (2014). *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah Selama dan Setelah Krisis Ekonomi Global 2008 (Studi Pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah …*. repository.uinjkt.ac.id. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/25073